

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia sebagai negara berkembang tidak lepas dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan tolok ukur untuk melihat kemajuan pembangunan ekonomi pada periode tertentu. Pertumbuhan ekonomi sebagai sebuah proses peningkatan output dari waktu ke waktu menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan pembangunan suatu negara. Oleh karena itu pertumbuhan ekonomi tidak bisa lepas dari kata pembangunan. (Todaro, 2005 dalam Ma'ruf Ahmad, Wihastuti Latri. 2018 : 44)

Pembangunan merupakan proses agar terjadi perubahan menuju arah yang lebih baik dari sebelumnya, Pada era saat ini sedang gencar – gencarnya terjadi pembangunan hampir di seluruh wilayah Indonesia dari perkotaan sampai pedesaan, mulai dari membangun kereta rel listrik jakarta sampai pembangunan Trans Sumatra yang pada dasarnya bertujuan untuk mempermudah aktifitas sehari – hari, meningkatkan taraf hidup dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan itu sendiri dapat dilakukan melalui pembangunan nasional maupun pembangunan daerah.

Setelah berlakunya Undang - Undang NO 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Undang - Undang NO 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah atas dasar tersebut, saat ini daerah di tuntut untuk melaksanakan desentralias

guna mengoptimalkan potensinya dan lebih memperhatikan keanekaragaman sumber daya alam yang ada agar mampu dikembangkan, diolah dan dimanfaatkan sehingga dapat meningkatkan perekonomian daerah.

Pembangunan daerah itu sendiri adalah suatu proses dimana pemerintah daerah dan seluruh komponen masyarakat mengelola berbagai sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan untuk menciptakan suatu lapangan kerja baru dan merangsang pengembangan kegiatan ekonomi, dalam daerah tersebut tergantung dari masalah fundamental yang dihadapi. Bagaimana mengatasi masalah fundamental yang dihadapi ditentukan oleh strategi pembangunan yang dipilih, dalam konteks ini pentingnya merumuskan visi dan misi, dan kemudian memilih strategi yang tepat (Kuncoro,2004 dalam Sjafrizal 2014 : 175)

Dalam meningkatkan pembangunan daerah diperlukan strategi dan kebijakan pembangunan daerah sebagai landasan dasar perencanaan yang bersangkutan, dan kebijakan pembangunan daerah ini harus disesuaikan dengan kondisi permasalahan pokok dan potensi pembangunan utama yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan (Nurman, 2015), Kebijakan pembangunan harus dibuat berdasarkan observasi terlebih dahulu dan melihat kondisi masing – masing daerah, apa potensi yang perlu di kembangkan dan permasalahan apayang harus di selesaikan, kemudian baru di tentukan strategi dan kebijakan dibuat, agar dalam pelaksanaan pembangunan daerah dapat dilakukandengante pat sasaran sehingga hasil yang di capai dapat

maksimal sesuai dengan apa yang telah diharapkan. Strategi dan kebijakan pembangunan daerah dapat dilakukan melalui perencanaan sektoral yaitu perencanaan yang ruang lingkupnya untuk satu bidang atau sector pembangunan tertentu saja, misalnya pertanian, pendidikan, Kesehatan dan Lainnya. (Sjafrizal, 2014 : 77)

Sektor – sektor potensial harus terlebih dahulu ditentukan dengan menggunakan data Produk Domestik Regional Bruto, selain itu PDRB juga menjadi indikator kinerja pertumbuhan ekonomi suatu daerah karena menampilkan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah, atau merupakan jumlah dari seluruh nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi di suatu wilayah, kemudian di jadikan dasar perencanaan dan evaluasi pembangunan wilayah. Terdapat 17 sektor Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) yang menjadi indikator kinerja perekonomiannya yaitu :

- (1) Pertanian, Kehutanan dan Perikanan,
- (2) Pertambangan dan Pengalihan,
- (3) Industri Pengolahan,
- (4) Pengadaan Listrik dan Gas,
- (5) Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, dan Daur Ulang,
- (6) Konstruksi,
- (7) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor,
- (8) Transportasi dan Pergudangan,

- (9) Penyediaan Akomodasi Makan dan Minum,
- (10) Informasi dan Komunikasi,
- (11) Jasa Keuangan dan Asuransi,
- (12) Real Estate,
- (13) Jasa Perusahaan,
- (14) Administrasi Pemerintah, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib,
- (15) Jasa Pendidikan,
- (16) Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial,
- (17) Jasa Lainnya.

Dari 17 sektor ekonomi di atas terdapat sektor –sector potensi yang dapat di teliti dan diharapkan dapat mengoptimalkan potensi daerah yang ada sehingga mampu memberikan kontribusi besar terhadap perekonomian di wilayah tersebut.

Penulis memilih dua Kabupaten di Jawa Timur untuk dijadikan objek penelitian yaitu Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban. Bojonegoro sebagai wilayah yang berbatasan langsung dengan Jawa Tengah semakin pesat pembangunannya mulai dari berdirinya pusat perbelanjaan, tempat wisata seperti Go Fun, bioskop, dan juga penggalian minyak. Sedangkan, Kabupaten Tuban, memiliki pembangunan yang pesat mulai dari tempat - tempat wisata pantai sampai wisata religi, dan penggalian minyak.

**Tabel 1. Jumlah PDRB dan Luas wilayah Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban**

Tahun	PDRB (Juta Rupiah)		Luas Wilayah (Km <sup>2</sup> )	
	Bojonegoro	Tuban	Bojonegoro	Tuban
2013	39,039,384.31	33,087,968.78	2.307,06	1.839,94
2014	39,934,829.04	34,921,171.18		
2015	46,892,805.91	36,704,486.90		

Sumber : Badan Pusat Statistik, 2018.

Berdasarkan tabel 1.1 di atas Kabupaten Bojonegoro memiliki wilayah yang lebih luas di bandingkan dengan Kabupaten Tuban, selain itu jumlah Produk Domestik Regional Bruto antara keduanya memiliki perbedaan jumlah yang cukup jauh, padahal memiliki wilayah yang berdekatan.

Berdasarkan uraian di atas maka dalam penelitian ini akan dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai **“Analisis Potensi Ekonomi Lokal di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban Dengan Menggunakan *Location Quotient* dan Tipologi Klasen”**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Apa saja Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.
2. Bagaimana Kemajuan Wilayah di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Sektor Basis dan Non Basis di Kabupaten Bojonegoro

dan Kabupaten Tuban.

2. Untuk mengetahui Kemajuan Wilayah di Kabupaten Bojonegoro dan Kabupaten Tuban.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

1. Penelitian ini dapat di jadikan referensi untuk penelitian selanjutnya agar dapat melengkapi apa yang kurang dalam penelitian ini dan mengembangkan topik pembahasan penelitian ini.
2. Penelitian ini dapat menambah perbendaharaan perpustakaan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis UPN “Veteran” Jawa Timur.